

UU

BPJS

masih adakewajiban yang harus dipenuhi agar dapat menimbulkan harmonisasi seperti ini.

Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hukum dan peraturan yang saling bertentangan dan segera ditindaklanjuti, mengingat SJSN merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan ASN.

3. Manfaat yang akan didapatkan bagi peserta dari PP 70 Tahun 2015 patut diduga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara apabila dilihat dari manfaat dan premi dibandingkan dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemerintah dimohon secepatnya untuk melakukan penataan ulang kembali dari peraturan-peraturan yang terkait dengan SJSN agar kembali pada jalannya sesuai UU SJSN.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2007).
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Black, Henry Champbell. Black Law Dictionary with Pronunciations, Edisi VI (USA: West Publishing, 1990).
- Hartini, Sri. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supono. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013).
- Kammerhofer, Jörg. Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective, (London dan New York: Routledge, 2010).
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1993).
- Manan, Bagir. Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta, 2004).
- Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996).
- Putri, Asih Eka. Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama, 2014).
- Rachbini. Ekonomi Politik Uang, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Scheining, Martin. The Right to Social Security dalam Economic Social and Cultural Right, A Textbook, Edited by Asbjorn Eide,

- Catarina Krause dan Alan Roses, (London: MartinusNijhoff Publishers,1994)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (SuatuTinjauanSingkat), (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001).
- Soekanto, Soerjono. PengantarPenelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Soemitro, Ronny Haniatjo. MetodePenelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).
- Sudaryanto.MetodeLinguistik (Bagian Pertama: KeArahMemahamiMetodeLinguistik), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988).
- Sugiyono. Statistikuntuk Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sulastomo. SistemJaminan Nasional MewujudkanAmanahKonstitusi, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011).
- _____. MekanismePendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011).
- Sutedi, Adrian. Hukum Perburuhan, (Jakarta: SinarGrafika, Jakarta, 2011)
- Suteki dan GalangTaufani. MetodologiPenelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Raja GrafindoPersada, 2018).
- Thabrany, Hasbullah, SudahTibaWaktunya: Urgensi, Konseptualisasi, dan OperasionalisasiJaminan Kesehatan Universal di Kota dan KabupatenSeluruh Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009).

Thabrany, Hasbullah. Jaminan Kesehatan Nasional, (Jakarta: Rajawali, 2014).

Sastrawidjaja, M.Suparman. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, (Bandung: Alumni, 1997).

B. PERATURAN NASIONAL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1963
tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri

Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2016

Putusan MK Nomor 138/PUU-XII/2014

Naskah Akademik UU SJSN

C. JURNAL

Agustiati, Sistem Ekonomi Kapitalisme, (Palu: Tadulako Law Review
Universitas Tadulako, Volume 1 No. 2, 2009).

Andryan. Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung
terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik

- Indonesia, (Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum De Jure, September 2018)
- Arighi, Hafidh. Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, (Surabaya: Jurist-Diction Universitas Airlangga, Volume 3 No. 6, November 2020).
- Dinanti, Aldila dan Gianjar Adi Nugraha. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, (Purwokerto: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Universitas Jendral Soedirman, Volume 20 Nomor 01 Tahun 2018).
- Ginting, Dean Cakra Buana dan I Gusti Ayu Putri Kartika, Perlindungan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Pemberian Jaminan Sosial, (Badung: Kertha Semaya, FH Universitas Udayana, 13 Maret 2018).
- Irfani, Nurfaqih. Organisasi Jaminan Sosial di Negara Federal Republik Jerman: Suatu Perbandingan. (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 9 No. 2 Juli 2012).
- Iwan Gardono Sujatmiko, Privatisasi, Kapitalisme dan Negara Dalam Pelayanan Kesehatan (Suatu Studi Perubahan Sosial Dalam Industri Kesehatan), (Jakarta: Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI, 2010).

Komara, Endang. Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia, (Bandung: Mimbar Pendidikan Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Maret 2019).

Manan, Bagir. Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan, (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008).

Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka N. A. M. Sihombing. Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9 No 2, Juli 2012).

Purwoko, Bambang. Jaminan Sosial Standar International dan Variasi Implikasinya di Berbagai Negara Asean, (Jakarta: Jurnal Usahawan No. 12, 1999).

Riyadi, Ery Dwi Antono, Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial Untuk Petugas K3L Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, (Bandung: Focus Jurnal Pekerjaan Sosial, Universitas Padjadjaran, Juli 2018).

Sumadi, Hendy. Prinsip-Prinsip Jaminan Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hukum, (Subang: *Law Enforcement Jurnal Ilmu Hukum*, FH Universitas Subang, 1 April 2017).

Taufikdkk, Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Kematian Tenaga Kontrak Pada Sekretariat Daerah Aceh, (Banda Aceh: Syiah Kuala Law Journal, FH Universitas Syiah Kuala, Agustus 2019).

Yan, Radlyah Hasan. Eksistensi Sistem Kapitalisme di Indonesia, (Manado: *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado*, Volume 8 No. 1, 2010).

D. LAPORAN

Daniel Perwira, Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial Pengalaman Indonesia, Kertas Kerja, (Jakarta : Lembaga Penelitian SMERU, 2003).

Pierre Mouton, Methods of Financing Social Security in Industrial Countries dalam Financing Social Security, the Options : An International Analysis, (Geneva: International Labour Organization, 1984)

E. INTERNET

Admin web BPJS Ketenagakerjaan, Sejarah BPJS Ketenagakerjaan,
[https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html#:~:text=Sejarah%20terbentuknya%20PT%20Jamsostek%20\(Pe%20rsero,No.15%2F1957%20tentang%20pembentukan](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html#:~:text=Sejarah%20terbentuknya%20PT%20Jamsostek%20(Pe%20rsero,No.15%2F1957%20tentang%20pembentukan), (diakses : 6 Januari 2020).

Adminweb PT TASPEN, Sejarah PT Taspen,
https://www.taspen.co.id/#/history?_k=r4d38l, (diakses: 06 Januari 2020).

Azhari Bahrul, Warning KPK Terhadap Menpan RB dan PT. Taspen,
<https://www.kba.one/news/warning-kpk-terhadap-menpan-rb-dan-pt-taspen/index.html> (diakses 8 Januari 2021).

Jurnal Entrepreneur, Mengenal BPJS Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan, dalam <https://www.jurnal.id>, diakses tanggal 04 November 2020.

Rappler, Hak Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dalam <https://www.rappler.com>, Di akses tanggal 02 November 2020.

Sabir Laluhi, Wasit Tiga Asuransi Negara, <https://kumparan.com/sabir-laluhi/wasit-tiga-asuransi-negara-1seyhUYGXmF/full>, (diakses : 08 Januari 2021)